

## BAB II

### DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Keagenan

Teori keagenan membahas hubungan antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda dalam suatu organisasi dan masing-masing bekerja dengan motivasi untuk memenuhi kepentingan mereka masing-masing. Menurut Rankin *et al.* (2018), *agency theory is used to understand relationships whereby a person or a group of persons (the principal) employs the services of another (the agent) to perform some activity on their behalf. Agent memiliki kewajiban untuk memenuhi keinginan principal namun keduanya diasumsikan, namun saat keinginan agent dan principal tidak sejalan, mungkin bagi agent untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan principal (Rankin et al., 2018).* Jensen dan Meckling mengidentifikasi tiga biaya keagenan yaitu :

1. *Monitoring costs*

Biaya pemantauan untuk mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku *agent*. Biaya ini termasuk biaya untuk melakukan pengauditan.

2. *Bonding costs*

Dengan adanya *bounding cost*, manajer (*agent*) mungkin setuju untuk tidak memberikan informasi kepada pihak eksternal yang mungkin memiliki keunggulan kompetitif darinya, namun mereka akan dibebani melalui waktu dan usaha ekstra ataupun pendapatan yang harus dikorbankan sebagai akibat dari tidak menyediakan informasi secara eksternal.

### 3. *Residual loss*

Terkadang terlalu mahal untuk selalu menjamin *agent* akan membuat keputusan yang optimal bagi *principal*, bahkan terkadang lebih mahal untuk memantau *agent* daripada manfaat yang diharapkan dari pemantauan tersebut.

Manajer sebagai *agent* memiliki keuntungan dibandingkan *principals* dikarenakan mereka memiliki lebih banyak informasi terkait aktifitas dan kinerja entitas dan mereka dapat memilih kapan dan bagaimana mereka akan menyebarkan informasi (Rankin *et al.*, 2018). Untuk mencegah adanya informasi asimetris yang kemudian akan menyebabkan konflik antara *agent* dan *principal*, dibentuklah komite audit untuk melakukan pengawasan terkait pengungkapan kinerja keuangan dan non keuangan perusahaan. Berdasarkan Dey dalam Mohammadi *et al.* (2020), tingkat dan keparahan konflik keagenan lebih rendah jika perusahaan memiliki komite audit yang efektif dari segi komposisi dan fungsi.

## 2.2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi digunakan untuk memahami tindakan dan aktivitas perusahaan terutama yang berhubungan dengan masalah sosial dan lingkungan. Kontrak sosial sering digunakan untuk mendeskripsikan interaksi antara bisnis dan masyarakat. Kontrak sosial ini bentuknya tidak selalu berupa perjanjian tertulis, namun dari apa yang kita pahami diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan Rankin, *et al.* (2018), *legitimacy theory argues that organisations can only continue to exist if the society in which they operating within a value*

*system that is consistent with society's own.* Dengan ini berarti dapat diasumsikan bahwa berdasarkan teori legitimasi, suatu perusahaan terdorong menjalankan tanggung jawab sosial perusahaannya guna mendapatkan pengakuan dari masyarakat yang mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan.

Organisasi harus secara berkelanjutan menunjukkan telah beroperasi dalam perilaku yang konsisten dengan nilai sosial seringkali dapat dicapai melalui penungkapan dalam laporan perusahaan Wilmshurst & Frost dalam Hilmi & Rinanda (2020). Adanya komite audit sebagai komite independen yang melakukan pengawasan terhadap pengungkapan CSR akan membantu menjaga legitimasi masyarakat.

### **2.3. Corporate Governance**

Berdasarkan *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* dalam Rankin *et al.* (2018) *corporate governance* didefinisikan sebagai :

“prosedur dan proses yang dengannya organisasi diarahkan dan dikendalikan. Struktur tata kelola perusahaan menentukan distribusi hak dan tanggung jawab antara organ yang berbeda dalam organisasi antara lain dewan, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.”

Dengan adanya *corporate governance* yang baik maka akan lebih mudah mencapai tujuan dan memantau kinerja perusahaan.

Komponen dalam *corporate governance* berdasarkan Rankin *et al.* (2018) yaitu terdiri dari :

- a. Mengontrol dan mengarahkan direktur dan manajemen senior

Fokus pada usaha memastikan bahwa manajemen kunci membuat keputusan tepat dan tidak demi kepentingan pribadinya ataupun keuntungan pribadinya atas pemangku kepentingan lain.

b. Peran dari pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

Fokus pada usaha untuk memastikan bahwa pemegang saham memiliki kemampuan untuk menjaga kepentingannya di perusahaan dengan cara berpartisipasi dalam mengarahkan perusahaan dan menjalankan kendali di tingkat pengawasan secara efektif.

c. Transparansi dan akuntabilitas

Fokus pada usaha memberikan keyakinan bahwa pemangku kepentingan memperoleh informasi yang cukup mengenai kegiatan perusahaan dan manajemennya, dan untuk memungkinkan manajer memenuhi kewajiban akuntabilitas mereka.

Di samping itu berdasarkan KNKG (2006), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yaitu meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Untuk menghasilkan *corporate governance* yang baik, sangat dibutuhkan adanya pengawasan yang baik yang dilakukan oleh dewan komisaris dibantu dengan komite audit.

#### **2.4. Corporate Social Responsibility**

Tanggung jawab social perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

“komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

Program *CSR* merupakan suatu bentuk investasi perusahaan untuk *growth* dan *sustainability* perusahaannya yang sudah tidak lagi dipandang sebagai beban namun sebagai sarana untuk memperoleh laba (Kurnia *et al.*, 2019).

Seluruh perusahaan dituntut untuk menjalankan program *CSR* sehingga perusahaan tidak hanya bekerja guna memperoleh laba bagi investor tetapi kehadirannya juga diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat umum khususnya yang berada di sekitar perusahaan yang terkena dampak dari berdirinya perusahaan (Budiarta & Raharjo, 2014). Program *CSR* yang direalisasikan perusahaan kemudian nantinya diungkapkan di dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Pasal 66, pelaksanaan *CSR* wajib diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, namun item-item yang diungkapkan didalamnya bersifat sukarela karena tidak ada peraturan yang mengikat. Berikut indeks pengungkapan *CSR* menurut *GRI Standards* :

**Tabel 2.1.**

**Indeks Pengungkapan *CSR* (*GRI Standards*)**

<b>KATEGORI EKONOMI</b>		
Kinerja Ekonomi (GRI 201)	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan
	201-2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang lain akibat dari perubahan iklim

	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya
	201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah
Keberadaan Pasar (GRI 202)	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional
	202-2	Proporsi manajemen senior yang berasal dari masyarakat local
Dampak Ekonomi Tidak Langsung (GRI 203)	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan
	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan
Praktek Pengadaan Publik (GRI 204)	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok local
Anti korupsi (GRI 205)	205-1	Operasi-operasi yang dinilai memiliki risiko terkait korupsi
	205-2	Komunikasi dan pelatihan tentang kebijakan dan prosedur anti korupsi
	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Anti perilaku kompetitif (GRI 206)	206-1	Langkah-langkah hukum untuk perilaku anti-persaingan, praktik anti-trust dan monopoli
Pajak (GRI 207)	207-4	Laporan per negara

<b>KATEGORI LINGKUNGAN</b>		
Material (GRI 301)	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
	301-2	Material input dari daur ulang yang digunakan
	301-3	Produk reclaimed dan material kemasannya
Energi (GRI 302)	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi
	302-2	Konsumsi energi diluar organisasi
	302-3	Intensitas Energi
	302-4	Pengurangan konsumsi energy
	302-5	Pengurangan pada energi yang dibutuhkan untuk produk dan jasa
Air dan Efluen (GRI 303)	303-3	Pengambilan air
	303-4	Pembuangan air
	303-5	Konsumsi air
Keanekaragaman Hayati (GRI 304)	304-1	Lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola, atau berdekatan dengan kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan lindung
	304-2	Dampak signifikan dari kegiatan, produk, dan jasa pada keanekaragaman hayati
	304-3	Habitat yang dilindungi atau direstorasi

	304-4	Spesies Daftar Merah IUCN dan spesies daftar konservasi nasional dengan habitat dalam wilayah yang terkena efek operasi
Emisi (GRI 305)	305-1	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	305-2	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	305-3	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	305-4	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	305-5	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	305-6	Emisi zat perusak ozon (ODS)
	305-7	Nitrogen oksida (NO <sub>x</sub> ), sulfur oksida (SO <sub>x</sub> ), dan emisi udara yang signifikan lainnya
Efluen dan Limbah (GRI 306)	306-1	Pelepasan air berdasarkan kualitas dan tujuan
	306-2	Limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	306-3	Tumpahan yang signifikan
	306-4	Pengangkutan limbah berbahaya
	306-5	Badan air yang dipengaruhi oleh pelepasan dan/atau limpahan air
Kepatuhan Lingkungan (GRI 307)	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup



Penilaian Lingkungan Pemasok (GRI 308)	308-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria lingkungan
	308-2	Dampak lingkungan negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
<b>KATEGORI SOSIAL</b>		
Kepegawaian (GRI 401)	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan
	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu
	401-3	Cuti melahirkan
Hubungan tenaga kerja / manajemen (GRI 402)	402-1	Periode pemberitahuan minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional
Kesehatan dan Keselamatan Kerja (GRI 403)	403-8	Pekerja yang tercakup dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja
	403-9	Kecelakaan kerja
	403-10	Penyakit akibat kerja
Pelatihan dan Pendidikan (GRI 404)	404-1	Rata-rata jam pelatihan per tahun per karyawan
	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan

	404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier
Keanekaragaman dan Kesempatan Setara (GRI 405)	405-1	Keanekaragaman badan tata kelola dan karyawan
	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan dibandingkan laki-laki
Non-diskriminasi (GRI 406)	406-1	Insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif (GRI 407)	407-1	Operasi pemasok di mana hak atas kebebasan berserikat dan perundingan kolektif mungkin berisiko
Pekerja anak (GRI 408)	408-1	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko signifikan terhadap insiden pekerja anak
Kerja paksa atau Wajib Kerja (GRI 409)	409-1	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik Keamanan (GRI 410)	410-1	Petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
Hak-hak Masyarakat Adat (GRI 411)	411-1	Insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat

Penilaian Hak Asasi Manusia (GRI 412)	412-1	Operasi-operasi yang telah melewati tinjauan hak asasi manusia atau penilaian dampak
	412-2	Pelatihan karyawan mengenai kebijakan atau prosedur hak asasi manusia
	412-3	Perjanjian dan kontrak investasi signifikan yang memasukkan klausul-klausul hak asasi manusia atau yang telah melalui penyaringan hak asasi manusia
Masyarakat Lokal (GRI 413)	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat local, penilaian dampak, dan program pengembangan
	413-2	Operasi yang secara actual dan yang berpotensi memiliki dampak negative signifikan terhadap masyarakat local
Penilaian Sosial Pemasok (GRI 414)	414-1	Seleksi pemasok baru dengan menggunakan kriteria social
	414-2	Dampak sosial negatif dalam rantai pasokan dan tindakan yang telah diambil
Kebijakan Publik (GRI 415)	415-1	Kontribusi politik
Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan (GRI 416)	416-1	Penilaian dampak kesehatan dan keselamatan dari berbagai kategori produk dan jasa
	416-2	Insiden ketidakpatuhan sehubungan dengan dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa

Pemasaran dan Pelabelan (GRI 417)	417-1	Persyaratan pelabelan dan informasi produk dan jasa
	417-2	Insiden ketidakpatuhan terkait pelabelan dan informasi produk dan jasa
	417-3	Insiden ketidakpatuhan terkait komunikasi pemasaran
Privasi Pelanggan (GRI 418)	418-1	Pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran terhadap privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan Sosial Ekonomi (GRI 419)	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial ekonomi

Sumber : GRI (2017)

## 2.5. Komite Audit

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit melakukan rapat berkala dan pada rapat tersebut komite audit dapat menyampaikan hasil evaluasinya kepada pihak manajemen perusahaan. Untuk melakukan fungsi pengawasannya dengan baik dibutuhkan komite audit dengan kualitas yang baik pula, terdapat beberapa kriteria yang akan mempengaruhi

kualitas kinerja komite audit sehingga dapat berdampak pada semakin baiknya pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan antara lain ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, dan keragaman *gender* komite audit.

### **2.5.1. Ukuran Komite Audit**

Ukuran komite audit menunjukkan jumlah anggota yang ada dalam suatu komite audit dalam satu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 anggota komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten. Semakin besar ukuran komite audit akan semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan sehingga kegiatan sosial berjalan lancar dan legitimasi dapat terjaga (Sihombing *et al.*, 2020).

### **2.5.2. Frekuensi Rapat Komite Audit**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 Tahun 2015, rapat komite audit diadakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 kali dalam 3 bulan dan baru dapat diselenggarakan jika dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Dengan tingginya frekuensi rapat komite audit menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan efektif karena setiap muncul permasalahan dalam perusahaan langsung didiskusikan dalam rapat komite audit sehingga lebih cepat mendapat solusi untuk penyelesaian masalah tersebut (Muamal, 2011).

### 2.5.3. Keragaman *Gender* Komite Audit

*Gender* merupakan perbedaan laki-laki dan perempuan yang tampak dari nilai dan perilaku (Sastrawati, 2018). Meskipun perempuan dan laki-laki berbeda namun mereka seharusnya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Berdasarkan Sastrawati (2018), laki-laki memiliki kecenderungan bersikap tegas dan mengedepankan rasionalitas, sedangkan wanita cenderung memiliki tingkat kehati-hatian lebih tinggi dan lebih teliti daripada pria (Kusumastuti, *et al.*, 2007). Kelebihan yang dimiliki pria dan wanita jika disatukan maka akan dapat membantu fungsi pengawasan komite audit agar berjalan lebih efektif, maka dari itu dibutuhkan adanya keragaman gender dalam sebuah komite audit. Gut *et al.* dalam Appuhami & Tashakor (2017) menyatakan bahwa keragaman *gender* dapat meningkatkan kemampuan anggota dewan dan komitennya untuk menyediakan pengawasan yang lebih baik dalam pengungkapan dan laporan perusahaan, serta dapat meningkatkan difusi informasi.

### 2.6. Penelitian Terdahulu

Pertama penelitian dari Madi *et al.* (2014) menggunakan variabel independen yaitu independensi komite audit, keahlian keuangan, frekuensi rapat, ukuran komite audit, dan jabatan rangkap komite audit. Variabel dependennya yaitu pengungkapan *CSR*. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Malaysia pada akhir tahun 2009. Hasil dari penelitian ini yaitu independensi komite audit, ukuran komite audit, dan jabatan rangkap komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*. Sedangkan keahlian keuangan komite audit dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*.

Penelitian kedua dari Haribowo (2015) menggunakan variabel independen *Islamic Corporate Governance*, ukuran dewan komisaris, komisaris independensi, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, rapat komite audit, profitabilitas, dan likuiditas. Variabel dependennya yaitu pengungkapan *CSR*. Penelitian dilakukan pada Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Islamic Corporate Governance*, komisaris independen, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen, frekuensi rapat komite audit, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*. Sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*.

Penelitian berikutnya dari Appuhami & Tashakor (2017), variabel independen yang digunakan yaitu ukuran dewan komite audit, frekuensi rapat, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, dan keragaman gender komite audit. Variabel dependennya yaitu pengungkapan *CSR*. Variabel kontrol yang digunakan yaitu jenis industri, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan independensi dewan. Penelitian dilakukan pada perusahaan Australia yang terdaftar dalam ASX pada Juli 2012-Juni 2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa frekuensi rapat, independensi komite audit, keragaman *gender*, jenis industri, profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*. Sedangkan ukuran komite audit dan keahlian keuangan auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*.

Kemudian yang terakhir penelitian dari Mohammadi *et al.* (2020) menggunakan variabel independen yaitu ukuran dewan direksi, kepemilikan

manajerial, independensi dewan, dualitas *CEO*, independensi komite audit, ukuran komite audit, dan keahlian keuangan komite audit, sedangkan variabel dependennya yaitu pengungkapan *CSR*. Penelitian juga menggunakan variabel kontrol yang terdiri dari kualitas pengauditan, pengembalian saham, likuiditas, *ROA*, opini audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, rugi, *restatement*, *market to book ratio*, dan arus kas operasi. Penelitian dilakukan pada perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Iranian pada tahun 2012-2018. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan direksi, independensi dewan, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, dari kualitas pengauditan, pengembalian saham, likuiditas, *ROA*, opini audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, rugi, *restatement*, *market to book ratio*, dan arus kas operasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *CSR*, sedangkan kepemilikan manajerial dan dualitas *CEO* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *CSR*.

**Tabel 2.2.**

**Ringkasan Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil Penelitian
1.	Madi <i>et al.</i> (2014)	X1 : Independensi komite audit X2 : Keahlian keuangan	Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Malaysia	Hasil penelitian ini yaitu independensi komite audit, ukuran komite audit, dan jabatan



		<p>X3 : Frekuensi rapat</p> <p>X4 : Ukuran komite audit</p> <p>X5 : Jabatan rangkap komite audit</p> <p>Y : Pengungkapan CSR</p>		<p>rangkap komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, sedangkan keahlian keuangan komite audit dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR.</p>
2.	Hariwibowo (2015)	<p>X1 : <i>Islamic Corporate Governance</i></p> <p>X2 : Ukuran dewan komisaris</p> <p>X3 : Komisaris independensi</p>	Bank Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia	<p>Hasil penelitian ini yaitu <i>Islamic Corporate Governance</i>, komisaris independen, rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, komite audit independen,</p>

		<p>X4 : Rapat dewan komisaris</p> <p>X5 : Ukuran komite audit</p> <p>X6 : Komite audit independen</p> <p>X7 : Rapat komite audit</p> <p>X8 : Profitabilitas</p> <p>X9 : Likuiditas</p> <p>Y : Pengungkapan CSR</p>		<p>frekuensi rapat komite audit, profitabilitas, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR.</p>
3.	Appuhami & Tashakor (2017)	<p>X1 : Ukuran dewan komite audit</p> <p>X2 : Frekuensi rapat</p>	<p>Perusahaan Australia yang terdaftar dalam ASX</p>	<p>Hasil penelitian ini yaitu frekuensi rapat, independensi komite audit, keragaman <i>gender</i>, jenis industri,</p>

		<p>X3 : Independensi komite audit</p> <p>X4 : Keahlian keuangan komite audit</p> <p>X5 : Keragaman gender komite audit</p> <p>X6 : Jenis industri</p> <p>X7 : Profitabilitas</p> <p>X8 : Ukuran perusahaan</p> <p>X9 : <i>Leverage</i></p> <p>X10 : Independensi dewan</p> <p>Y : Pengungkapan <i>CSR</i></p>		<p>profitabilitas, ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan independensi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>CSR</i>, sedangkan ukuran komite audit dan keahlian keuangan auditor tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>CSR</i>.</p>
--	--	---	--	---

4.	Mohammadi <i>et al.</i> (2020)	<p>X1 : Ukuran dewan direksi</p> <p>X2 : Kepemilikan manajerial</p> <p>X3 : Independensi dewan</p> <p>X4 : Dualitas CEO</p> <p>X5 : Independensi komite audit</p> <p>X6 : Ukuran komite audit</p> <p>X7 : Keahlian keuangan komite audit</p> <p>X8 : Kualitas pengauditan</p> <p>X9 : Pengembalian saham</p>	Perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Iranian	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ukuran dewan direksi, independensi dewan, ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan komite audit, dari kualitas pengauditan, pengembalian saham, likuiditas, ROA, opini audit, ukuran perusahaan, leverage, pertumbuhan penjualan, rugi, <i>restatement</i>, <i>market to book ratio</i>, dan arus kas</p>
----	-----------------------------------	--	--	---

		<p>X10 : Likuiditas</p> <p>X11 : <i>ROA</i></p> <p>X12 : Opini audit</p> <p>X13 : Ukuran perusahaan</p> <p>X14 : <i>Leverage</i></p> <p>X15 : Pertumbuhan penjualan</p> <p>X16 : Rugi</p> <p>X17 : <i>Restatement</i></p> <p>X18 : <i>Market to book ratio</i></p> <p>X19 : Arus kas operasi</p> <p>Y : Pengungkapan <i>CSR</i></p>		<p>operasi berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>CSR</i>, sedangkan kepemilikan manajerial dan dualitas <i>CEO</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>CSR</i>.</p>
--	--	---	--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

## 2.7. Pengujian Hipotesis

### 2.7.1. Ukuran Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Aktivitas operasi perusahaan menimbulkan dampak yang tidak selalu positif bagi lingkungan sekitarnya, maka dari itu dibutuhkan pertanggungjawaban perusahaan atas dampak negatif yang ditimbulkan. Berdasarkan teori keagenan, manajemen perusahaan sebagai *agent* memiliki lebih informasi terkait aktifitas dan kinerja perusahaan dibandingkan masyarakat sebagai *principal*. Untuk melindungi agar *agent* melakukan pengungkapan secara transparan dibutuhkan adanya komite audit. Suatu komite audit dibentuk untuk membantu dewan komisaris menjalankan tugas pengawasannya, salah satunya terkait pengungkapan CSR. Semakin besar ukuran komite audit akan semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan sehingga kegiatan sosial berjalan lancar dan legitimasi dapat terjaga (Sihombing *et al.*, 2020).

Hasil penelitian terdahulu dari Madi *et al.* (2014) dan Mohammadi *et al.* (2020) menunjukkan bahwa ukuran komite audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran komite audit, maka akan semakin luas pengungkapan CSR perusahaan tersebut. Berdasarkan paparan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini yaitu :

**Ha1 : Ukuran Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan CSR.**

### 2.7.2. Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Menurut teori keagenan, untuk mencegah terjadinya masalah keagenan antara manajemen perusahaan dan *principal*, dibentuklah komite audit yang berfungsi sebagai pengawas *agent* dalam melakukan pengungkapan informasi kepada pihak eksternal. Hasil rapat komite audit akan disampaikan pada saat komite melakukan rapat bersama dengan dewan direksi dan dewan komisaris. Komite audit dapat memberikan tekanan kepada dewan direksi untuk melakukan pengungkapan CSR dengan lebih baik yaitu dengan memperluas pengungkapan CSR perusahaannya agar memperoleh legitimasi dari masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu dari Appuhami & Tashakor (2017) menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan CSR. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi frekuensi rapat komite audit, maka akan semakin luas pengungkapan CSR perusahaan tersebut. Berdasarkan paparan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini yaitu :

**Ha2 : Frekuensi Rapat Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan CSR.**

### 2.7.3. Keragaman Gender Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

Untuk menurunkan keparahan konflik keagenan, dibutuhkan komposisi komite audit yang efektif. Adanya laki-laki dan perempuan dalam satu komite audit dapat meningkatkan efektivitas komite tersebut karena laki-laki dan

perempuan mempunyai kelebihan masing-masing yang dibutuhkan untuk meningkatkan performa komite audit dalam melakukan pengawasan.

Hasil penelitian terdahulu dari Appuhami & Tashakor (2017) menunjukkan bahwa keragaman *gender* komite audit memiliki hubungan positif terhadap pengungkapan *CSR*. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya keragaman *gender* dalam komite audit, maka akan semakin luas pengungkapan *CSR* perusahaan tersebut. Berdasarkan paparan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis untuk penelitian ini yaitu :

**Ha3 : Keragaman *Gender* Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan *CSR*.**